

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin presiden Suharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari, kolusi dan nepotisme maupun 'politik uang' di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia 'didorong' untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara. Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat (dan ini sebenarnya berarti race-nya lumayan adil maka berbeda dengan pemilu era Orde Baru). Menurut Kabar berita online Indonesia Investments (27/05/2019, 23:00 WIB).

Pemilu menurut Hoesien, Zainal Arifin., dan Arifudin. (2017:28). Pemilu merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilu, rakyat 'dianggap' memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Sebab pemilu menjadi alat utama dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Jangan sampai pemilu menjadi ajang pemilihan namun tidak atas kehendak rakyat yang sesungguhnya. Kehendak rakyat sesungguhnya ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya, setiap pemilihan

dalam pemilu selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.. Mulai dari penyelenggaraan pemilu pertama kali di tahun 1955, warga yang ditetapkan sebagai pemilih diantaranya dipersyaratkan adalah mereka yang mampu menulis. Artinya mereka yang tidak bisa menulis, mereka tidak bisa memilih. Kemudian beda lagi dengan rumusan persyaratan pemilih di zaman pemerintahan Orde Baru. Di zaman Orde Baru ini, mereka yang terlibat dalam gerakan G/30/S/PKI tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Begitu seterusnya hingga pada pemilu yang diselenggarakan pada pasca reformasi selalu mengalami perubahan dalam persyaratan bagi warga yang bisa jadi pemilih.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:125), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Menurut Kabar berita online BeritaSatu (27/03/2019, 23:00 WIB) Mengatakan bahwa : Salah satu yang membedakan Pemilu 2019 dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah luasnya perhatian terhadap kelompok milenial. Berbagai survei menunjukkan bahwa kaum milenial akan menjadi penentu dalam pemilu tahun depan. Tak tanggung-tanggung, menurut berbagai survei, jumlah suara kelompok milenial mencapai 40% dari keseluruhan pemilih. Maka tidak heran jika kemudian banyak politisi menggarap serius suara dari kelompok ini. Milenial sendiri mengacu pada kategorisasi yang berbeda-beda. Misalnya, dari segi usia dan tahun kelahirannya. Ada yang memberikan label milenial kepada

para individu yang lahir antara 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Aspek yang melatarbelakangi perspektif kaum millennial ini bahwasanya kaum millennial didaerah kelurahan bukit duri sangat antusias dalam menyikapi perpolitikan. Kaum millennial dalam menyikapi berbagai perpolitikan yang ada sangat didukung dengan adanya kajian-kajian dari berbagai partai yang masuk kedalam kelurahan bukit duri ini. Maka timbulah keinginan gerakan dari kaum millennial untuk membuat gerakan dengan hastag #2019GANTIPRESIDEN .

Sejarah organisasi pemuda yaitu contohnya ada pada Organisasi Budi Utomo. Kemudian menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi lain, beberapa Organisasi Gerakan Pemuda pun bermunculan di Indonesia. Salah satu contoh gerakan yang ada yaitu Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perkumpulan pemuda ini didirikan pada bulan September 1926 oleh para pelajar yang berasal dari Jakarta dan Bandung. Tokoh yang memelopori berdirinya perkumpulan ini yaitu meliputi : Sugondo, Abdullah Sigit, Reksodipuro, Suwiryono, Sumanang dan A.K. Abdul Gani. Tujuan berdirinya organisasi pergerakan pemuda ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau menjadikan Indonesia menjadi negara yang merdeka bebas dari penjajahan.

Pemilihan judul ini berkaitan dengan kaum milenial (kaum muda) dan gerakan yang ada di daerah kelurahan bukit duri DKI Jakarta. Kaum milenial mencakup 34,5 persen hingga 50 persen dari total penduduk Indonesia (Burneo Bulletin:2018), namun setengah dari mereka menjauhkan diri dari politik.

Menurut Sandiaga Uno, kaum milenial melihat politik dan sebagai ‘kotor dan membosankan’. Beberapa “masalah” yang tampaknya mematikan ketertarikan pemuda Indonesia termasuk korupsi, lingkungan, dan pengangguran. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus bagi para kandidat menjelang Pilpres 2019 April .

Ada berbagai sumber yang memang mengakui bahwasanya paslon Prabowo dan Sandi sudah memasuki wilayah kelurahan bukit duri ini. Diadakan spanduk-spanduk yang ada dengan slogan ganti presiden. Kaum millennial didaerah kelurahan bukitduri ini memiliki masalah yang merupakan perbedaaan pendapat dan selisih paham karena banyak slogan-slogan yang dipajang di jalan daerah kelurahan bukit duri ini.

Sebagaimana data yang diperoleh dilapangan yang dijadikan data awal, Menyebutkan Rizky sebagai wakil ketua karang taruna periode 2018-2021 . Selain wakil ketua karang taruna rizky juga sebagai mahasiswa Universitas Trisakti angkatan 2016. (Sumber informan Rizky , pada tanggal 10 Februari 2019, pukul 16.00 WIB, bertempat dirumah RW setempat.)

Sebelumnya peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada Rizky untuk memperoleh data awal dalam penelitian. Seperti yang dikatakan oleh Rizky beliau melihat bahwasanya permasalahan yang ada di kaum millennial setempat yaitu perihal kampanye pasangan calon presiden satu dan dua. Dalam hal ini kebanyakan kaum millennial di kelurahan bukit duri ini pro sekali dengan slogan 2019 ganti presiden. Dengan hal sebagaimana banyak pro dan kontra didalam pemilihan umum yang akan datang ini dikelurahan bukit duri ini. Spanduk-

spanduk yang ada juga menunjukkan bahwa didaerah kelurahan bukit duri Jakarta ini sangatlah pro terhadap 2019 ganti presiden.

Berdasarkan data yang ada kaum millennial yang dimaksud disini kisaran umur 18-35 tahun. Tetapi peneliti mengambil ukuran untuk millennial yang dimaksud kisaran 17-24 tahun saja. Perempuan maupun laki-laki yang ada dikelurahan bukit duri tersebut. Pada data yang diambil dari kantor kelurahan bukit duri ini merupakan data umur penduduk yang ada didalamnya.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk yang tergolong kaum Millennial di Kelurahan Bukit Duri
Jakarta Selatan tahun 2017

Usia	Jumlah penduduk perempuan	Jumlah Penduduk Laki-laki
15-19	1563	1751
20-24	1577	1672
Jumlah	3140	3423

Sumber : Data Sekunder Kelurahan Bukit Duri.

Dari data yang bahwasanya kaum millennial di kelurahan bukit duri tergolong banyak dan memang sebagian besar dari mereka mendukung dalam 2019 ganti presiden. Penulis merasa tertarik dengan fenomena ini karena kaum millennial didaerah kelurahan bukit duri berpartisipasi dan mau berperan dalam pemilihan umum presiden 2019 ini. Masyarakat memandang bahwasanya

dikelurahan bukit duri ini sebagian besar kaum millennialnya mau ikut dalam partisipasi politik yaitu dengan kampanye. Memang dari banyaknya kaum millennial yang ada di kelurahan bukit duri ini tidak semua setuju dengan 2019 ganti presiden, maka dari itu terjadilah pro dan kontra diarah kaum millennial di kelurahan bukit duri ini. Maka dari itu penulis mau mengangkat ini menjadi masalah dalam penelitian penulis.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah perspektif kaum millennial tentang gerakan #2019gantipresiden?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi dan menitik beratkan pada hal mengenai strategi apa saja yang dilakukan oleh paslon nomor 2 untuk mengubah perspektif kaum millennial di kelurahan bukit duri untuk ganti presiden di pemilihan umum april 2019 yang akan mendatang.

D. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu

informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian (Moleong, 2009: 93-94).

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

Perspektif kaum millennial dalam pemilihan umum di Kelurahan Bukit Duri Jakarta : Informasi masyarakat millennial kelurahan bukit duri Jakarta.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Perspektif yang terjadi pada kaum milenial di kelurahan Bukit duri, Jakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan perspektif dalam politik, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum presiden dan wakilnya yang berkaitan dengan fenomena yang ada di masyarakat kaum millennial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menggali wacana baru khususnya dalam mata kuliah sosiologi politik dan komunikasi politik, Perspektif dan interaksi perseorangan maupun kelompok dalam lingkup sosial yang ada

didalamnya. Selebihnya bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan, masukan, serta ide bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik ditataran lokal maupun nasional, khususnya tentang perspektif masyarakat millennial.